

Kolaborasi Paacla dalam *Multilevel Governance* Untuk Pengurangan Pekerja Anak pada Sektor Pertanian di Nusa Tenggara Barat

Baiq Nelsa Novia Rochmy¹, Pamungkas Ayudaning Dewanto², Zulkarnain³, Sirwan Yazid Bustami⁴

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

³Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

⁴Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

baiqnelsa@gmail.com

ABSTRACT

Child labor is a global social problem, especially in the agricultural sector. Various groups of actors, both at the national and global levels are currently concentrating on reducing the number of child workers. There are consequences of child labor in the agricultural sector, one of which is the health of child laborers such as injuries, heatstroke, fatigue, respiratory illness and exposure to chemicals. This also violates children's rights where children should learn, play and be able to grow and develop properly. This paper aims to find out how the forms of cooperation in overcoming child labor through PAACLA in the agricultural sector in NTB are carried out together with various parties such as non-governmental organizations and government agencies. This research is a descriptive research method, using the Multi-Level Governance Concept and Child Labor Concept.

Keywords: *Child Labor, PAACLA, Agriculture*

ABSTRAK

Pekerja anak adalah masalah sosial yang menglobal, terutama di sektor pertanian. Berbagai kalangan aktor, baik di tingkat nasional ataupun global saat ini berkonsentrasi untuk mengurangi angka pekerja anak. Terdapat konsekuensi pekerja anak dalam sektor pertanian salah satunya yaitu terhadap kesehatan bagi para pekerja anak seperti cedera, sengatan panas, kelelahan, penyakit pernapasan dan paparan bahankimia. Hal ini juga melanggarhak-hak anak diman aanak-anak seharusnya belajar, bermain dan dapat tumbuh kembang dengan baik. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kerjasama dalam Pengurangan pekerja anak melalui PAACLA pada sektor pertanian di NTB yang dilakukan Bersama dengan berbagai pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga-lembaga Pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif, menggunakan Konsep Multilevel Governance dan Konsep Child Labour.

Kata Kunci: Pekerja Anak, PAACLA, Pertanian

PENDAHULUAN

Pekerja anak (*child labour*) adalah masalah sosial yang menglobal. Berbagai kalangan aktor, baik di tingkat nasional ataupun global saat ini berkonsentrasi untuk mengurangi angka pekerja anak. Dengan bekerja, kesempatan anak-anak untuk memperoleh pendidikan, bermain dan istirahat menjadi terkekang. Selain itu beberapa jenis pekerjaan juga membahayakan keselamatan dan kesehatan, serta menghambat tumbuh kembang anak-anak. Fenomena pekerja anak memiliki konotasi yang buruk, yakni eksploitasi terhadap anak, menukar tenaga mereka dengan gaji yang kecil dan membahayakan keamanan, kesehatan dan masa

depannya¹. Terdapat banyak penelitian yang menyatakan bahwa menjadi pekerja anak memiliki dampak jangka panjang terhadap capaian pendidikan dan pendapatan pada masa yang akan datang, serta kesehatan. Beberapa studi kasus dalam sektor pertanian memiliki konsekuensi kesehatan bagi para pekerja anak seperti cedera, sengatan panas, kelelahan, penyakit pernapasan dan paparan bahan kimia.²

Indonesia mengalami keterpurukan dalam isu pekerja anak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, penduduk usia 10-17 tahun yang menjadi pekerja di Indonesia mencapai 1,17 juta jiwa pada tahun 2020. Angka ini naik sebesar 320 ribu jiwa dibandingkan pada tahun 2019.³ Data anak Indonesia pada 2019 menunjukkan bahwa terdapat 10 provinsi di Indonesia yang memiliki angka pekerja anak di atas rata-rata nasional. Anak yang bekerja di sektor tembakau dapat berakibat pada bahaya fisik, psikologis anak dan terganggunya aktivitas Pendidikan belajar anak. Anak-anak pedesaan di NTB banyak bekerja di sektor tembakau hal ini banyak dikarenakan oleh masalah perekonomian keluarga mereka. Orang tua yang tidak menganggap pendidikan sebagai investasi yang baik bagi anak-anak mereka, membuat opsi untuk bersekolah menjadi pilihan kedua disbanding opsi untuk bekerja.

PAACLA bersama berbagai pihak berkolaborasi untuk mengurangi pekerja anak pada sektor pertanian di Indonesia melalui program KESEMPATAN (Kemitraan Strategis untuk Menanggulangi Pekerja Anak di Pertanian di Indonesia). Program ini, telah diinisiasi untuk lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.⁴ Program inididukung oleh pihak-pihak di Indonesia dan Yayasan ECLT (*Eliminating Child Labour in Tobacco Growing*) yang juga berfokus kepada pekerja anak yang bekerja di sektor tembakau dimana yayasan ini berperan sebagai pemberi dana untuk pelaksanaan program KESEMPATAN.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian atau Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Penelitian Kualitatif, dimana menurut Creswell (2009) penelitian kualitatif merupakan sebuah proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian ini mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial kedalam tema dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data⁵. Penelitian

¹ILO, *Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dan Pekerja Anak*, Cetakan Pe. (Jakarta: ilo.org, 2009), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_144313.pdf.

²Emmy Hermanus et al., *Studi Diagnostik Pekerja Anak Di Wilayah Perdesaan (Dengan Penekanan Khusus Pada Perkebunan Tembakau Rakyat)* (Jakarta, 2021), <https://smeru.or.id/publication-id/studi-diagnostik-pekerja-anak-di-wilayah-perdesaan-dengan-penekanan-khusus-pada>.

³kemenpppa, "Sebelas Juta Anak Berpotensi Menjadi Pekerja Anak Di Masa Pandemi, Pentingnya Sinergi Melakukan Pencegahan," *Kemenpppa.Go.Id*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2810/sebelas-juta-anak-berpotensi-menjadi-pekerja-anak-di-masa-pandemi-pentingnya-sinergi-melakukan-pencegahan>.

⁴Michelle Andrina et al., *Studi Baseline Mengenai Pekerja Anak Di Wilayah Perkebunan Tembakau Di Indonesia Studi Baseline Mengenai Pekerja Anak Di Wilayah Perkebunan Tembakau Di Indonesia*, ed. Dhania Perti Sarahtika and Liza Hadiz (Jakarta: The SMERU Research Institute, 2019), <https://smeru.or.id/publication-id/studi-baseline-mengenai-pekerja-anak-di-wilayah-perkebunan-tembakau-di-indonesia>.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari, edisi keti. (Bandung: Alfabeta, CV, 2018).

kualitatif dilakukan untuk menjelaskan serta untuk menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial seseorang atau kelompok terhadap sesuatu.

KERANGKA PEMIKIRAN

MULTI-LEVEL GOVERNANCE

Multi-level Governance adalah sebuah pendekatan yang melihat keterhubungan berbagai aktor di banyak level yang berbeda-beda. Keterhubungan ini bisa terjalin dalam skala multilevel seperti lokal, regional, nasional dan bahkan internasional. Pendekatan multilevel ini tentu akan menggarisbawahi terlibatnya berbagai aktor seperti pemerintah, kelompok masyarakat madani dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan yang bersifat non-tradisional. Pada mulanya, peneliti menangkap MLG ini mulai dilaksanakan di Eropa menyikapi isu keimigrasian. Namun demikian, dalam perkembangannya melebar pada berbagai permasalahan yang muncul seperti lingkungan, perubahan iklim, kohesi sosial dan Pendidikan ⁶.

Konsep MLG ini merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan mobilisasi simultan otoritas publik di berbagai tingkat yuridiksi, serta organisasi non-pemerintah (LSM) dan Gerakan sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa hubungan antar-level dan aktor yang berbeda MLG tidak selalu mencerminkan satu kesatuan fungsional tetapi lebih diilhami oleh upaya para aktor untuk menemukan solusi kebijakan, mempromosikan kepentingan dan mempertahankan nilai-nilai yang mereka yakini. Dalam pendekatan ini mengenalkan beberapa dimensi dalam mencermati berbagai isu yang muncul

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

Public Private Partnership (PPP) dapat diterjemahkan sebagai perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah, yang keduanya bergabung bersama dalam sebuah kerjasama untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik di mana kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk publik. *Public Private Partnership* adalah suatu kerjasama dalam penyediaan infrastruktur antara pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan mitra badan usaha swasta, baik badan usaha dalam negeri ataupun badan usaha asing.

Kerjasama tersebut meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun, meningkatkan kemampuan pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. *Public Private Partnership* juga merupakan bentuk perjanjian atau kontrak antara sektor publik dan sektor private yang terdiri atas beberapa ketentuan antara lain: sektor privat menjalankan fungsi pemerintah untuk periode tertentu, sektor privat menerima kompensasi atas penyelenggaraan fungsi baik secara langsung maupun tidak langsung, sektor privat bertanggung jawab atas resiko yang timbul dari penyelenggaraan fungsi tersebut. Konsep Public Private Partnership dapat dijadikan sebagai alternatif penyediaan infrastruktur. Public Private Partnership dapat memunculkan hubungan antara publik dan private untuk bekerjasama dalam pembangunan.

⁶ Ricard Zapata-Barrero, Tiziana Caponio, and Peter Scholten, "Theorizing the 'Local Turn' in a Multi-Level Governance Framework of Analysis: A Case Study in Immigrant Policies," *International Review of Administrative Sciences* 83, no. 2 (2017): 241–246.

Keuntungan yang dapat diperoleh pada hubungan ini adalah inovasi, kemudian keuangan, kemampuan teknologi, dan pengaturan efisiensi. Pada prinsipnya, PPP mengemukakan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal itu juga dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan pendanaan maupun rendahnya kualitas pelayanan dari pemerintah pelayanan publik. Pada hakekatnya, pelibatan sektor swasta dalam mengembangkan sarana dan prasarana akan memberikan keuntungan baik bagi pemerintah maupun swasta. Bagi sektor swasta keuntungan yang didapat dengan mekanisme ini adalah profit. Adapun keuntungan bagi pemerintah adalah mempermudah proses penyediaan serta meringankan beban pendanaan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan. Keuntungan lain yang diperoleh oleh pemerintah adalah terciptanya transfer teknologi dan efisiensi managerial dari pihak swasta yang dikombinasikan dengan rasa tanggung jawab serta kepedulian terhadap lingkungan.

CHILD LABOUR (PEKERJA ANAK)

Pekerja anak adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral. Pekerja anak merupakan anak-anak yang bekerja pada pekerjaan yang merusak mereka dan karena itu harus dihentikan, lebih jelasnya pekerja anak bukanlah anak yang mengerjakan tugas kecil disekitar rumah atau yang mengerjakan pekerjaan dalam jumlah sedikit sepulang sekolah. Pekerja anak juga tidak mencangkup anak yang melakukan pekerjaan yang wajar dilakukan untuk tingkat perkembangan anak seusianya dan yang memungkinkan anak memperoleh keterampilan praktis dan mengembangkan tanggungjawab.

Pekerja anak juga adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal⁷. Konsep pekerja anak didasarkan pada Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang menggambarkan definisi internasional yang paling komperhensif tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, mengacu secara tidak langsung pada kegiatan ekonomi. Usia minimum menurut Konvensi ILO Nomor 138 untuk negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas Pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5 – 11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pekerja anak. Anak-anak usia 12 – 14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan dan anak usia sampai 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya⁸.

Terdapat beberapa bentuk pekerjaan yang diketahui banyak dikerjakan oleh sejumlah besar pekerja anak yaitu Pekerjaan dibidang pertanian dimana sebagian besar anak bekerja dibidang pertanian dan perikanan, anak-anak ini mulai bekerja sejak usia dini dan jam kerja mereka lebih Panjang daripada jam kerja anak-anak di perkotaan. Yang kedua yaitu Pekerjaan

⁷ Kanyaka Prajnaparamita, "Perlindungan Tenaga Kerja Anak," *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 2 (2018): 215–230.

⁸ Ibid.

rumah tangga, bentuk pekerjaan ini sangat umum di Indonesia dan banyak yang menganggapnya sebagai suatu hal yang wajar dan dapat diterima⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SITUASI SOSIOKULTURAL PEKERJA ANAK DI NTB

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga para orangtua dilarang menelantarkan anaknya, dimana hal ini sudah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Orang tua dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur¹⁰. Namun ternyata disekeliling kita masih banyak anak kurang beruntung yang terpaksa mempertahankan hidup dengan bekerja dengan usia yang masih terlalu muda, sehingga anak-anak yang bekerja tersebut tidak dapat menikmati hak tumbuh dan berkembang karena faktor yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga yang rendah atau kemiskinan¹¹.

Di Indonesia masih banyak anak yang tergolong sebagai anak yang bekerja dan sebagaimana diantaranya bekerja dalam kondisi yang berbahaya. Pertanian merupakan salah satu sektor yang dinilai memaparkan banyak bahaya kerja pada para pekerjanya di semua kalangan usia, terutama bagi anak-anak. Anak-anak yang bekerja di pertanian mungkin saja menggunakan mesin-mesin berat atau alat-alat kerja yang cukup tajam, terpapar pestisida dan bekerja dengan jam kerja yang panjang dan dalam cuaca yang ekstrim. Jika dilihat langsung di Pedesaan, Aktifitas keseharian utama warga desa adalah bertani sehingga banyak anak-anak terlibat atau dilibatkan, jadi itu yang menjadi alasan utama ditemukan banyak pekerja anak di Pedesaan terutama pada sektor Pertanian. Anak-anak banyak terlibat dalam pertanian merupakan salah satu cara regenerasi petani, jika anak-anak tidak diperkenalkan dengan pertanian maka petani di Indonesia akan hilang. Karena sudah memang budaya didesa, jadi para petani mengajarkan anak-anak untuk bercocok tanam secara langsung ataupun tidak langsung. Namun dalam keterlibatannya tersebut tidak jarang bertabrakan dengan norma-norma yang telah diadopsi di Indonesia yaitu Konvensi ILO.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak di dua desa yaitu di desa Pandanwangi yang terletak di Kabupaten Lombok Timur dan desa Sengkerang yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, penelitian ini menemukan bahwa fenomena pekerja anak itu terjadi karena minimnya pengetahuan petani beserta keluarganya tentang isu pekerja anak dan bahayanya bagi anak-anak. Pekerja anak pada sektor tembakau di Nusa Tenggara Barat sering kali terlibat dalam berbagai kegiatan yang berbahaya dan berpotensi merugikan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Temuan lapangan dalam penelitian menunjukkan bahwa anak-anak terlibat mulai dari proses panen, pengeringan daun tembakau, pengolahan tembakau, hingga pekerjaan yang berhubungan dengan produksi tembakau. Pekerjaan tersebut dapat memberikan paparan bahan kimia berbahaya, seperti pestisida dan bahan kimia lain. Selain itu, pekerja anak juga dapat terpapar oleh debu tembakau yang dapat mengakibatkan masalah

⁹ ILO, *Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dan Pekerja Anak*.

¹⁰ Nandi, "Pekerja Anak Dan Permasalahannya," *Jurnal Geografi Gea* 6, no. 1 (2016), <https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/view/1731/1181>.

¹¹ Indar Wahyuni, "Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah)," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 4, no. 1 (2017): 45–61.

pernapasan dan kesehatan lainnya.¹² Meski tingginya resiko paparan terhadap penyakit, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap anak-anak yang bekerja di sektor pertanian. Masyarakat menganggap anak-anak yang bekerja sebagai hal yang biasa karena secara kultural, pengiriman pekerja anak ke ladang-ladang tembakau sudah dilakukan secara turun-temurun dimana para orang tua melibatkan anak-anak untuk ikut bekerja. Pelibatan anak untuk bekerja untuk membantu orang tuanya mencari nafkah dinilai oleh masyarakat sekitar sebagai bentuk empati dan bakti anak kepada keluarganya¹³. Selain itu, masyarakat sekitar juga memandang bahwa anak yang bekerja sejak kecil merupakan proses melatih anak. Dengan meminta anak-anak mereka bekerja, para orang tua menganggap dirinya telah mendidik anak-anak mereka untuk mandiri. Dengan bekerja, orang tua beranggapan anak-anaknya dimasa mendatang akan tahu bagaimana cara bertahan hidup di dunia yang keras karena anak-anak tersebut sudah terbiasa bekerja sedari kecil.¹⁴

Pada musim tembakau tersebut para orang tua mengharapkan bantuan dari anaknya, bahkan jika diwilayah pedesaan para anak-anak lebih diprioritaskan untuk bekerja karena para pemilik pertanian tembakau rakyat menganggap bahwa anak-anak lebih serius ketika bekerja dan upah yang diberikan tidak sebesar upah yang diberikan untuk para orang tua. Anak-anak banyak terlibat pada masa panen tembakau karena proses penanaman lebih sulit dan harus ditanam dengan teliti sehingga harus orang tua yang melakukan penanaman tersebut. Proses penanaman itu sendiri dapat terbagi menjadi proses pembibitan, proses penyiapan lahan penanaman, pemupukan, penyemprotan, menyulik dan panen.

Ditemukan bahwa anak-anak usia SMP dan SMA yaitu sekitar 14-17 tahun memiliki kelompok sendiri atau biasa disebut sebagai Kelompok Borongan yang dapat dipanggil ketika ada pekerjaan di pertanian tembakau. Anak-anak bekerja di sektor tembakau ini umumnya sudah ikut bekerja saat mereka masih Sekolah Dasar (SD), namun terdapat perbedaan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan umur mereka seperti anak-anak perempuan dibawah 14 tahun hanya melakukan pekerjaan begelantang dan mensortir daun tembakau.¹⁵ Terdapat perbedaan pandangan dalam cara membesarkan anak yang mana itu bertentangan dengan prinsip pengentasan pekerja anak yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengurangan Pekerja Anak Pasal 1, menyatakan bahwa pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan Kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang, ayat selanjutnya menyatakan bahwa Pengurangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak

¹² “Wawancara Dengan Bapak Jedon, Anggota Dari Yayasan Santai Dan Perangkat Desa Pandanwangi, 10 Juni 2023, Di Desa Pandanwangi Kabupaten Lombok Timur.”

¹³ Netty Endrawati, “Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Di Kota Kediri),” *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM* 5, no. April (2011): 19–43, <http://jnk.phb.ac.id/index.php/jnk/article/view/374>.

¹⁴ “Wawancara Dengan Sulton, Fasilitator Dari Yayasan Santai Untuk Wilayah Lombok Tengah, 7 Juni 2023, Di Mataram.”

¹⁵ Ibid.

berusia 15 tahun kebawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.

¹⁶

Jadi terdapat beberapa argument masyarakat mengenai pekerja anak yaitu sebagai alternatif untuk mempertahankan ekonomi, faktor budaya dan di dalam struktur masyarakat mereka memprioritaskan anak-anak untuk bekerja. Terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat setelah dilakukannya intervensi dari Program Kesempatan dimana perubahan tersebut dikatakan sangat terasa bagi seluruh masyarakat di setiap desa mulai dari anak, orang tua, petani, buruh tani, bagi pemerintah desa bahkan sampai kepada desa tetangga. Perubahan pola pikir masyarakat yang terjadi setelah adanya program Kesempatan ini yaitu, sudah adanya kesadaran masyarakat mengenai pekerja anak dimana anak seharusnya dilindungi dan tidak dilibatkan dalam bekerja karena hal itu tidak baik dan berdampak buruk bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Pada saat dilaksanakannya program Kesempatan ini masyarakat masih belum menerima bahwa anak-anaknya akan dilarang untuk bekerja karena anak-anak tersebut dapat membantu perekonomian keluarganya dengan ikut bekerja di pertanian tembakau. Ditahun pertama program ini juga dikatakan berat karena masyarakat merasa dengan dilaksanakannya program ini akan membuat anak-anak menjadi manja karena tidak diperbolehkan bekerja dan masyarakat merasa bahwa anak-anak tersebut tidak akan patuh atau akan melawan kepada para orang tuanya. Selain tantangan dari masyarakat desa, terdapat juga tantangan yang dikatakan cukup berampak yaitu ketika Relawan yang ikut membantu kegiatan-kegiatan dari program Kesempatan Memiliki Pekerjaan lain sehingga tidak bisa memprioritaskan program ini.

Jadi, dengan adanya program Kesempatan ini ternyata banyak mengubah persepsi dan pola pikir masyarakat di satu sisi, di sisi lain memberikan efek ancaman kepada perusahaan-perusahaan mitra dari para petani untuk lebih teliti dalam pengecekan bahwa para petani pemilik pertanian tembakau tidak menggunakan pekerja anak. Setelah program Kesempatan dilaksanakan perusahaan-perusahaan tembakau juga ikut serta membantu untuk mengedukasi masyarakat terutama petani dan buruh tani mengenai pekerja anak.¹⁷

KOALISI PAACLA

PAACLA (Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture) adalah Kemitraan Multi-pihak untuk Pengurangan pekerja anak di sektor pertanian di Indonesia. Pembentukan PAACLA dimulai ketika survey SMERU Reseach Institute atas dukungan dari ECLT Foundation pada tahun 2016-2017 mengenai Pekerja Anak di Wilayah Pedesaan terkhusus pada Perkebunan Tembakau. Salah satu Rekomendasinya bahwa perlu intervensi komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Konsultasi Nasional tentang Membangun Lingkungan Pertanian Ramah Anak dalam Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 merekomendasikan dibentuknya kemitraan formal sebagai jalan terbaik dalam aksi Pengurangan pekerja anak di sektor pertanian.

¹⁶ Nandi, "Pekerja Anak Dan Permasalahannya."

¹⁷ "Wawancara Dengan Bapak Jedon, Anggota Dari Yayasan Santai Dan Perangkat Desa Pandanwangi, 10 Juni 2023, Di Desa Pandanwangi Kabupaten Lombok Timur."

Pada 18 Oktober 2018 dibentuklah Kemitraan Aksi Pengurangan Pekerja Anak di Pertanian dengan tujuan untuk membangun pemahaman dan kesepahaman bersama tentang konsep kemitraan yang diusulkan dan meminta masukan dari pemangku kepentingan tentang peran dan tanggungjawabnya. Pembentukan kemitraan ini sebagai langkah komprehensif dan jangka panjang dalam Pengurangan pekerja anak di sektor pertanian¹⁸. PAACLA berdiri diatas 3 Norma Internasional yaitu Konvensi Anak, Konvensi ILO dan UNGPs (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) sehingga mitra PAACLA berasal dari ketiga norma tersebut yaitu Pemerintah sebagai pemegang kewajiban (pemegang mandat), NGO tingkat Nasional dan Internasional yang bergerak di isu anak, pekerja anak, bisnis dan hak asasi manusia dan sektor bisnis¹⁹.

PAACLA Indonesia merupakan kemitraan yang memiliki komitmen dalam membangun pertanian ramah anak di pedesaan dan kelurahan di Indonesia. Intervensi PAACLA di pertanian mencakup sektor perkebunan, kehutanan, tanaman pangan, peternakan dan perikanan, dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia Bebas Pekerja Anak melalui Pertanian Ramah Anak, PAACLA juga memiliki misi untuk membangun kerjasama secara sinergis dengan melibatkan pemerintah, sektor bisnis dan organisasi masyarakat sipil dalam Pengurangan pekerja anak di pertanian. Keanggotaan PAACLA berjumlah 30 yang terdiri dari 5 Kementerian Lembaga, 12 Sektor Bisnis dan 13 Sektor Masyarakat Sipil (OMS). PAACLA Indonesia menggunakan kerangka kerja kolektif, sebuah pendekatan yang inovatif dan terstruktur untuk memperkuat antar Lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan sektor bisnis untuk mencapai perubahan yang signifikan dan berkelanjutan. PAACLA Indonesia dibangun pada 5 elemen kunci dan didasarkan pada prinsip-prinsip tanggung jawab, akuntabilitas, keadilan, transparansi, inklusif dan partisipatif²⁰.

UPAYA PAACLA DALAM PENGURANGAN PEKERJA ANAK DI SEKTOR PERTANIAN NTB

Pada tahun 2021, PAACLA mengadakan Workshop bersama JTI (Japan Tobacco International) dan Perusahaan pemasok.²¹ Workshop ini dilakukan untuk membangun persepsi tentang isu pekerja anak dan untuk mengembangkan agenda-agenda bersama untuk Pengurangan pekerja anak di masa depan. Salah satu kesepakatan dalam workshop ini yaitu perlunya dibentuk suatu komite daerah yang mengadopsi visi PAACLA Indonesia dan dapat mengakomodir kebutuhan dan keperluan anggota PAACLA Indonesia di tingkat daerah. Dengan workshop tersebut, Seknas PAACLA dengan mitra pelaksanaan program Kesempatan tengah menginisiasi pembentukan PAACLA Daerah di empat lokasi yaitu Kabupaten Jember, Probolinggo, Lombok Timur dan Lombok Tengah.²² Sampai pada tahun 2022, PAACLA Indonesia mengalami perkembangan terkait keanggotaan, jangkauan aksi ataupun capaian-

¹⁸ PAACLA, “Pembentukan PAACLA” (Jakarta: PAACLA Indonesia, 2020), <https://www.paaclaIndonesia.org/paacla-indonesia/>.

¹⁹ “Wawancara Dengan Bapak Andi Akbar, Program Officer Paacla Untuk Program Kesempatan, 19 Mei 2023, Di Mataram.”

²⁰ (PAACLA, 2020a)

²¹ JARAK, “Profil KESEMPATAN,” JARAK, last modified 2022, accessed June 28, 2023, https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1etWt9AFv-v__XxOIO6suMTSYG-9aC1vj?usp=sharing.

²² Andrina et al., *Studi Baseline Mengenai Pekerja Anak Di Wilayah Perkebunan Tembakau Di Indonesia Studi Baseline Mengenai Pekerja Anak Di Wilayah Perkebunan Tembakau Di Indonesia*.

capaian yang diraihinya seperti pembentukan forum PAACLA di Kabupaten Jember, Provinsi NTB, Kabupaten Probolinggo. Selain itu PAACLA melakukan kunjungan bersama *Elimination Child Labour in Tobacco Growing Foundation* terhadap perusahaan yaitu kepada PT. Japan Tobacco International, PT. British American Tobacco, PT. Alliance One Indonesia, PT. Mayangsari, PT. MangliDjaya Raya dan PT. Universal Tempurejo. Kunjungan tersebut membahas mengenai bagaimana kerangka kerja Pengurangan pekerja anak di pertanianyaitu *Protect, Respect dan Remedy*.

PAACLA Indonesia juga mendorong anggotanya untuk melakukan kolaborasi seperti program KESEMPATAN (Kemitraan Strategis untuk Penghapusan Pekerja Anak di Sektor Pertanian) sehingga program *Child Labour Eradication in Tobacco Area* (CERIA) sedang direncanakan untuk dilakukan di 2 desa di Kabupaten Jember dan Bondowoso serta 8 desa di lombok timur dan lombok tengah. Program KESEMPATAN atau Kemitraan Strategis untuk Penghapusan Pekerja Anak di Sektor Pertanian (KESEMPATAN) merupakan kolaborasi dari Tiga Anggota PAACLA yaitu Jaringan LSM untuk Pengurangan Pekerja Anak (JARAK) dengan Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) di NTB dan LPKP Jawa yang berlangsungsejak 2019-2022. Program Kesempatan merupakan program dengan melibatkan tiga pihak yaitu Pemerintah, Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil. Program ini dilaksanakan di 2 ProvinsiyaituProvinsi Jawa Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di NTB, Program inidilaksanakan di 2 Kabupaten yaitu Lombok Tengah dan Lombok Timur yang merupakan Kabupaten penghasil tembakau terbesar di NTB.

Dalam program KESEMPATAN ini, PAACLA bertugas untuk mengawasi proses pelaksanaan Program tersebut di 2 Povinsi yaitu Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Fokus Program ini yaitu untuk mengurangi angka pekerja anak di sektor pertanian tembakau. Program aksi ini dirancang dengan 4 tujuan yaitu untuk memperkuat PAACLA sebagai Lembaga kemitraan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pekerja anak dan kebijakannya bagi petani dan buruh tani, peningkatan pengetahuan pemangku kepentingan nasional dan yang terakhir untuk mengembangkan model desa ramah anak untuk direplikasikan ke wilayah lain. Sejalan dengan Rencana Aksi PAACLA Indonesia 2021 – 2024 dan agenda program Kesempatan, maka JARAK bersama ECLT Foundation memberikan dukungan pada penguatan kapasitas PAACLA Indonesia sebagai kemitraan strategis. Empat agenda prioritas yang menjadi milestones (tonggak) yaitu (1) Peningkatan kapasitas kelembagaan PAACLA (2) Peningkatan kapasitas anggota dan stakeholders (3) Perluasan akses public pada media PAACLA sebagai pusat data dan informasi (4) Perluasan keanggotaan di sektor pertanian ini, yaitu tembakau, kelapa sawit, kakao, dan pertanian tanaman pangan²³. JARAK berkolaborasi dengan Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) di NTB dan LPKP Jawa Timur mengusung pengembangan model desa ramah anak melalui Program Kesempatan yang sudah berlangsung di 30 desa model sejak 2019-2022.

Program ini dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun dengan tujuan untuk berkontribusi pada penurunan jumlah pekerja anak di pertanian Indonesia. Program ini menerima banyak

²³ PAACLA, *Laporan Tahunan - 2019 Kemitraan Multi-Pihak Untuk Pengurangan Pekerja Anak Di Sektor Pertanian Di Indonesia (PAACLA-INDONESIA)* (Jakarta, 2019), https://www.paaclaIndonesia.org/wp-content/uploads/2020/03/Laporan-Tahunan-PAACLA_2019.pdf.

dukungan untuk mengembangkan desa ramah anak dari berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun desa. Sesuai dengan semangat pembangunan desa ramah anak, kolaborasi dengan berbagai pihak harus dimunculkan. Pada tingkat desa, perencanaan melibatkan unsur desa dan kader serta anak-anak di wilayah setempat. Program Kesempatan ini dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Desa layak anak, sehingga terdapat beberapa upaya yang dilakukan seperti, terbentuknya kebijakan dan program untuk penyelenggaraan Perlindungan Anak di tingkat desa yang berupa sebuah peraturan desa, jadi peraturan Desa tidak hanya menyangkut isu pekerja anak namun isu anak secara keseluruhan.

Kebijakan yang didorong dalam model Desa Layak Anak yaitu terbentuknya Pusat Kegiatan Masyarakat (PKM), kegiatan yang diselenggarakan di PKM merupakan bagian dari upaya pencegahan dan mengatasi permasalahan yang mereka temukan di desa, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan akan dikelola oleh relawan, kader atau perangkat dusun. Selain itu juga dibentuk Lembaga-lembaga di tingkat desa yang dinamakan sebagai Gugus Tugas Desa Layak Anak (GTDLA) yang akan melakukan advokasi di tingkat desa, kemudian terdapat Forum Anak Desa (FAD) sebagai perwujudan partisipasi anak. Dengan adanya GTDLA dan FAD ini akan mendorong perencanaan kegiatan dan perumusan kebijakan di tingkat desa yang bertujuan untuk menjawab topik perlindungan anak dan mengatasi permasalahan anak di wilayah setempat²⁴.

TANTANGAN PAACLA DALAM PENGURANGAN PEKERJA ANAK PADA SEKTOR PERTANIAN DI NTB

Dengan dilaksanakannya Program Kesempatan di 10 Desa yang memiliki banyak Pekerja Anak pada sektor Pertanian tembakau tentunya mengalami berbagai tantangan. Tantangan yang dihadapi petugas pelaksana program Kesempatan ini sangat beragam. Di tahun pertama pelaksanaan Program Kesempatan, Petugas dihadapi oleh tradisi atau budaya yang sudah turun temurun, tradisi ini didukung oleh situasi sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat merasa dengan dilaksanakannya program ini akan membuat anak-anak menjadi manja karena tidak diperbolehkan bekerja dan dengan dilakukannya program kesempatan, masyarakat merasa bahwa anak-anak akan menjadi tidak patuh atau akan melawan kepada para orang tuanya. Hal itu juga dikarenakan oleh kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat mengenai Pekerja Anak.

Disisi lain dikarenakan tidak adanya aksi nyata yang dikembangkan oleh pemerintah yang langsung mengacu kepada isu anak dan pekerja anak di sektor pertanian.²⁵ Selain menghadapi kondisi sosial ekonomi dari masyarakat setempat, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kesempatan ini yaitu dalam kondisi politik desa, jadi dalam proses pemutusan desa-desa yang akan dijadikan sebagai lokasi Program Kesempatan ditetapkan dengan teliti dimana kondisi politik desa sangat mempengaruhi proses pelaksanaan dari Program Kesempatan.

²⁴ JARAK, "Profil KESEMPATAN."

²⁵ "Wawancara Dengan Bapak Andi Akbar, Program Officer Paacla Untuk Program Kesempatan, 19 Mei 2023, Di Mataram."

Pada dasarnya, faktor ekonomi merupakan penyebab utama anak-anak bekerja, Pandemi Covid-19 turut berpengaruh terhadap penambahan pekerja anak terutama kepada keluarga dengan ekonomi yang rendah.²⁶ Pada awal tahun 2020 masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia menimbulkan berbagai macam masalah, baik dari kesehatan dan perekonomian. Pekerja anak di Indonesia pada tahun 2020 memasuki angka yang cukup mengkhawatirkan karena pada tahun sebelumnya angka pekerja anak tidak separah tahun 2020. Data resmi dari Sakernas (survey angkatan kerja nasional) pada bulan agustus 2020 menyebutkan jumlah anak yang bekerja di Indonesia adalah sekitar 2.176.389 anak. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2019 yaitu anak yang bekerja dibawah umur berjumlah 1.633.020 anak, salah satu penyebab atas peningkatan anak bekerja pada masa pandemic Covid-19 ini ialah keluarga yang memanfaatkan anak mereka untuk diperkerjakan.

Hal ini dikarenakan pada awal masa pandemic Covid-19 di Indonesia pemerintah memberlakukan *lockdown* yang dimana hal tersebut membuat sekolah tutup dan mereka melakukan sekolah daring, dari hal tersebut lah para orang tua mereka memanfaatkan anak-anak mereka untuk membantu mereka mencari penghasilan.²⁷ Pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan kemiskinan sehingga akan meningkatkan angka pekerja anak, menurut BPS, Kemiskinan meningkat menjadi 10,19 persen pada 2020 atau setara dengan 27,55 juta orang. Hal tersebut dapat berpengaruh sekitar 9,18 juta anak yang berada pada rumah tangga miskin yang memiliki rentanitas menjadi pekerja anak.

Selain tantangan yang dihadapi para petugas, anak-anak juga mengalami tantang pada saat Pandemi Covid-19 dimana beberapa anak tidak memiliki telepon dan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran daring di Forum Anak Desa. Selain karena Pandemi Covid-19, tantangan yang dirasakan ketika Program ini sedang berjalan yaitu isu Pekerja Anak bukanlah isu yang berdiri sendiri namun melibatkan isu-isu anak yang lainnya sehingga dalam proses Pengurangan isu pekerja anak Program Kesempatan harus menyentuh isu-isu lainnya yang timbul bersama dengan isu Pekerja Anak. Hal lain yang dihadapi yaitu ketika Program ini merupakan program untuk merubah pola pikir masyarakat sehingga akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pelaksanaannya²⁸.

Dapat diketahui bahwa program kesempatan dilaksanakan sejak 2019-2022 yang merupakan tahun-tahun terberat bagi seluruh dunia. Berbagai rencana pertemuan dan penjangkauan masyarakat menjadi terbatas dan lebih banyak dilakukan secara virtual.²⁹ Anak-anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga menghadapi resiko besar terjerumus menjadi pekerja anak sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Pandangan akan tantangan yang dijelaskan tersebut yaitu disaat Program Kesempatan sedang dilaksanakan. Setelah program Kesempatan berakhir juga memberikan tantangan tersendiri kepada masyarakat yaitu bagaimana cara menjaga konsistensi dari pihak-pihak di yang sudah berkomitmen untuk terus

²⁶ ILO, "Pekerja Anak Meningkat Menjadi 160 Juta – Peningkatan Pertama Dalam Dua Dasawarsa."

²⁷ Anggari, "Peran ILO (International Labour Organization) Dalam Melindungi Pekerja Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Tahun 2020-2021."

²⁸ PAACLA, *Berjalan Ditengah Pandemi Covid-19* (Jakarta, 2020), https://www.paaclaindonesia.org/wp-content/uploads/2021/08/ANNUAL-REPORT-PAACLA-2021-BAHASA_bahan-posting.pdf.

²⁹ PAACLA, *Laporan Tahunan PAACLA Indonesia 2020* (Jakarta, 2020), https://www.paaclaindonesia.org/wp-content/uploads/2021/03/LAPORAN-TAHUNAN-PAACLA-2020_FINAL.pdf.

melaksanakan program tersebut pasca Program Kesempatan berakhir dan para petugasnya sudah tidak ada di setiap desa dengan kata lain yaitu bagaimana masyarakat di setiap desa akan terus menjalankan agenda.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu banyak faktor yang menyebabkan anak-anak ikut bekerja namun terdapat faktor utamanya yaitu dikarenakan rendahnya ekonomi keluarga, budaya masyarakat yang memang mengajak anak-anak ikut bekerja dan sebagai cara regenerasi petani Indonesia di masa depan. Dalam penelitian ini menggunakan konsep Multi-level Governance dimana untuk mengurangi kasus pekerja anak di NTB dilakukan oleh berbagai pihak. *Multi-level Governance* melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang saling berkolaborasi untuk membantu menurunkan angka pekerja anak di NTB, salah satu caranya yaitu melalui Program KESEMPATAN. Program ini melahirkan berbagai kegiatan yang membantu masyarakat dalam memahami mengapa anak tidak boleh menjadi pekerja anak dan Program ini membantu masyarakat, terutama anak-anak untuk lepas dari pekerjaan yang berbahaya.

Program KESEMPATAN dapat dikatakan berhasil dalam pengurangan pekerja anak di NTB, hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah pekerja anak pada sektor pertanian tembakau, anak-anak yang masih bekerja namun tidak bekerja di pekerjaan yang berbahaya, jam kerja anak-anak berkurang, jenis pekerjaan yang dilakukan anak-anak juga berkurang, pemahaman masyarakat terutama orang tua mengenai bahayanya pekerja anak dan dukungan-dukungan dari setiap pemerintah desa untuk mengurangi pekerja anak. Hal-hal yang dijelaskan diatas merupakan hasil dari pelaksanaan Program KESEMPATAN yang telah dilaksanakan di 10 desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi Program ini dikatakan berhasil tidak hanya dilihat dari jumlah pekerja anak yang berkurang namun dapat juga dilihat dari perubahan pola pikir masyarakat desa mengenai pekerja anak dimana masyarakat lebih memprioritaskan anak untuk belajar daripada bekerja.

REFERENCES

Andrina et al., *Studi Baseline Mengenai Pekerja Anak Di Wilayah Perkebunan Tembakau Di Indonesia Studi Baseline Mengenai Pekerja Anak Di Wilayah Perkebunan Tembakau Di Indonesia*.

Emmy Hermanus et al., *Studi Diagnostik Pekerja Anak Di Wilayah Perdesaan (Dengan Penekanan Khusus Pada Perkebunan Tembakau Rakyat)* (Jakarta, 2021), <https://smeru.or.id/id/publication-id/studi-diagnostik-pekerja-anak-di-wilayah-perdesaan-dengan-penekanan-khusus-pada>.

ILO, *Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dan Pekerja Anak*, Cetakan Pe. (Jakarta: ilo.org, 2009), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_144313.pdf.

ILO, "Pekerja Anak Meningkatkan Menjadi 160 Juta – Peningkatan Pertama Dalam Dua Dasawarsa."

JARAK, "Profil KESEMPATAN," *JARAK*, last modified 2022, accessed June 28, 2023, https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1etWt9AFv-v__XxOIO6suMTSYG-9aC1vj?usp=sharing.

Kanyaka Prajnaparamita, "Perlindungan Tenaga Kerja Anak," *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 2 (2018): 215–230.

kemenpppa, "Sebelas Juta Anak Berpotensi Menjadi Pekerja Anak Di Masa Pandemi, Pentingnya Sinergi Melakukan Pencegahan," *Kemenpppa.Go.Id*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2810/sebelas-juta-anak-berpotensi-menjadi-pekerja-anak-di-masa-pandemi-pentingnya-sinergi-melakukan-pencegahan>.

Michelle Andrina et al., *Studi Baseline Mengenai Pekerja Anak Di Wilayah Perkebunan Tembakau Di Indonesia Studi Baseline Mengenai Pekerja Anak Di Wilayah Perkebunan Tembakau Di Indonesia*, ed. Dhanisa Perti Sarahtika and Liza Hadiz (Jakarta: The SMERU Research Institute, 2019), <https://smeru.or.id/id/publication-id/studi-baseline-mengenai-pekerja-anak-di-wilayah-perkebunan-tembakau-di-indonesia>.

Nandi, "Pekerja Anak Dan Permasalahannya," *Jurnal Geografi Gea* 6, no. 1 (2016), <https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/view/1731/1181>.

Indar Wahyuni, "Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah)," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 4, no. 1 (2017): 45–61.

Netty Endrawati, "Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Di Kota Kediri)," *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM* 5, no. April (2011): 19–43, <http://jnk.phb.ac.id/index.php/jnk/article/view/374>.

PAACLA, *Laporan Tahunan PAACLA Indonesia 2020* (Jakarta, 2020), https://www.paaclaindonesia.org/wp-content/uploads/2021/03/LAPORAN-TAHUNAN-PAACLA-2020_FINAL.pdf.

PAACLA, "Pembentukan PAACLA" (Jakarta: PAACLA Indonesia, 2020), <https://www.paaclaindonesia.org/paacla-indonesia/>.

"Wawancara Dengan Bapak Andi Akbar, Program Officer Paacla Untuk Program Kesempatan, 19 Mei 2023, Di Mataram."

PAACLA, *Berjalan Ditengah Pandemi Covid-19* (Jakarta, 2020), https://www.paaclaindonesia.org/wp-content/uploads/2021/08/ANNUAL-REPORT-PAACLA-2021-BAHASA_bahan-posting.pdf.

PAACLA, *Laporan Tahunan - 2019 Kemitraan Multi-Pihak Untuk Pengurangan Pekerja Anak Di Sektor Pertanian Di Indonesia (PAACLA-INDONESIA)* (Jakarta, 2019), https://www.paaclaindonesia.org/wp-content/uploads/2020/03/Laporan-Tahunan-PAACLA_2019.pdf.

Ricard Zapata-Barrero, Tiziana Caponio, and Peter Scholten, "Theorizing the 'Local Turn' in a Multi-Level Governance Framework of Analysis: A Case Study in Immigrant Policies," *International Review of Administrative Sciences* 83, no. 2 (2017): 241–246.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari, edisi keti. (Bandung: Alfabeta, CV, 2018).

"Wawancara Dengan Bapak Jedon, Anggota Dari Yayasan Santai Dan Perangkat Desa Pandanwangi, 10 Juni 2023, Di Desa Pandanwangi Kabupaten Lombok Timur."

"Wawancara Dengan Sulton, Fasilitator Dari Yayasan Santai Untuk Wilayah Lombok Tengah, 7 Juni 2023, Di Mataram."

“Wawancara Dengan Bapak Andi Akbar, Program Officer Paacla Untuk Program Kesempatan, 19 Mei 2023, Di Mataram.”